

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat

Friedmann dalam Wrihatnolo, dan Riant (2007:59) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan muncul sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan sumber daya pribadi, partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. (Mubyarto, dalam Wrihatnolo, dan Riant, 2007:60).

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai isu sentral dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah. (Alfitri, 2011:21).

Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Artinya,

pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Craig dan Mayo dalam Alfitri (2011:22) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).

Pengertian konvensional (Wrihatnolo, dan Riant, 2007:115) konsep pemberdayaan yakni sebagai terjemahan *empowerment* yang mengandung arti: (1) *to give power or authority to* atau memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pengertian tersebut secara eksplisit menerangkan bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang.

Dubois dan Miley (dalam Wrihatnolo, dan Riant, 2007:116) menjelaskan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi:

1. Proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama;
2. Memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan;
3. Klien harus merasa sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi;
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup;
5. Meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas, untuk menggunakannya secara efektif;
6. Sinergis, dinamis, evolusioner, dan memiliki banyak solusi;

7. Pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan harus memenuhi enam hal berikut:

1. *Learning by doing*. Pemberdayaan adalah proses belajar, dan terdapat tindakan konkrit yang kontinyu dan dampaknya apat terlihat.
2. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan pemecahan masalah krusial pada waktu yang tepat.
3. *Self evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self development and coordination*. Pemberdayaan agar mendorong pengembangan diri dan melakukan koordinasi dengan pihak lain secara luas.
5. *Self selection*. Pemberdayaan menumbuhkan kemandirian dalam menetapkan langkah kedepan.
6. *Self decisim*. Pemberdayaan membuka kesadaran untuk memilih tindakan yang tepat dengan percaya diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

(Saraswati, dalam Alfitri, 2011:24).

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan:

1. Pemungkinan. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan. Melindungi masyarakat, terutama masyarakat lemah, agar tidak dieksploitasi oleh kelompok masyarakat yang kuat.

4. Penyokongan. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan. Menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

(Suharto, dalam Alfitri, 2011:27).

Azis dalam Alfitri (2011:26) memberikan panduan tahapan pemberdayaan sebagai berikut, *pertama*, membantu masyarakat menemukan masalahnya; *kedua*, melakukan analisis masalah tersebut secara mandiri; *ketiga*, menentukan skala prioritas masalah; *keempat*, mencari solusi atas masalah; *kelima*, implementasi penyelesaian masalah; *keenam*, evaluasi.

Pemberdayaan sebagai suatu perubahan yang terencana, dirinci oleh Lippit dalam Mardikanto, dan Riant (2012:123-124) kedalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyadaran. Yakni kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang eksistensinya tidak hanya sebagai individu dan anggota masyarakat, namun juga dalam kapasitas dalam lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi.
2. Menunjukkan adanya masalah. Yaitu menunjukkan masalah terutama menyangkut kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.
3. Membantu pemecahan masalah. Melakukan analisis akar masalah, alternatif solusi, serta pilihan alternatif paling mungkin.
4. Menunjukkan pentingnya perubahan. Perubahan sebagai sebuah keniscayaan universal harus diantisipasi secara terencana.
5. Melakukan pengujian dan demonstrasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas pemberdayaan paling bermanfaat yang beresiko terkecil.

6. Memproduksi dan publikasi informasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan sekali untuk menyesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat penyuluhannya.
7. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas. Yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat lapisan terbawah untuk bersuara menentukan pilihan-pilihannya.

Menurut Wrihatnolo, dan Riant (2007:38-39), beberapa alasan mengapa usaha pemberdayaan perlu dilakukan adalah, *pertama*, demokratisasi proses pembangunan. Konsep pemberdayaan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada lapisan masyarakat paling bawah untuk terlibat dalam pengalokasian sumber daya pembangunan. Pembangunan digerakkan oleh masyarakat sekaligus menjadi wahana pembelajaran pencerdasan bagi rakyat untuk mengenali kebutuhannya sendiri serta melaksanakan dan melestarikan upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Penerapan konsep pemberdayaan dengan demikian memberikan efek positif dalam penyelenggaraan ketatanegaraan secara baik.

Kedua, penguatan peran organisasi kemasyarakatan lokal. Konsep pemberdayaan melibatkan organisasi kemasyarakatan lokal agar berfungsi dalam pembangunan. Organisasi tersebut diasumsikan paling memahami karakteristik lokal masyarakat setempat sehingga peranannya harus diorganisir secara hierarkhis agar informasi tentang situasi terkini dapat dijalin secara multiarah baik vertikal maupun horizontal. *Ketiga*, penguatan modal sosial. Penguatan modal sosial mengandung arti pelembagaan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yakni, kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi spirit pemberdayaan.

Keempat, penguatan kapasitas birokrasi lokal. Konsep pemberdayaan memaksa jajaran pemerintah lokal memberikan perhatian lebih besar kepada rakyat untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam proses pemberdayaan rakyat pun bertambah cerdas sehingga mampu memaksa penyelenggara layanan publik untuk belajar memahami dan melayani rakyat dengan baik. *Kelima*, mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat menuntut pemerintah, dan pihak di luar pemerintah untuk memberikan pemihakan dan perlindungan terhadap rakyat miskin sehingga senantiasa teralokasi sumber daya pembangunan untuk rakyat miskin.

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Secara teoritis, kecenderungan primer menunjuk pemberdayaan sebagai proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar setiap individu menjadi lebih berdaya. Sebaliknya, kecenderungan sekunder menekankan pada proses memberikan stimulus, dan mendorong individu agar mampu menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog. (Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, dalam Wrihatnolo, dan Riant, 2007:119).

Sehubungan dengan deskripsi konseptual di atas, maka minimal terdapat tiga strategi pemberdayaan yang umum dilaksanakan (Wrihatnolo, dan Riant, 2007:119-120), yakni:

Pertama, pemberdayaan yang hanya berkuat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan konformis. Yaitu pemberdayaan hanya dilihat sebagai upaya peningkatan daya adaptasi terhadap struktur sosial-kemasyarakatan yang ada.

Bentuk strateginya adalah mengubah sikap mental masyarakat yang tidak berdaya dan pemberian bantuan. Program-program berjenis karitatif dan sinterklas termasuk dalam kategori ini. *Kedua*, pemberdayaan yang berkuat di “batang” atau pemberdayaan reformis. Konsep ini tidak mempermasalahkan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada, yang terpenting adalah kebijakan operasional. Pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan, dsb.

Ketiga, pemberdayaan yang berkuat di “akar” atau pemberdayaan struktural. Strategi ini melihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat adalah karena struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi kaum yang lemah, dengan demikian pemberdayaan ini menempuh strategi melalui transformasi struktural secara mendasar.

Menurut Soetomo (2011:72-85), dalam proses pemberdayaan masyarakat pendekatan yang dipergunakan yaitu:

1. Sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dalam hal ini diarahkan pada bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya. Desentralisasi ini berarti mencakup lapisan masyarakat miskin akar rumput, bukan semata berhenti pada elit lokal setempat.
2. *Top down* menjadi *bottom up*. Pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas. Proses dan mekanismenya dapat melalui dua kemungkinan; *pertama*, identifikasi masalah dan kebutuhan

masyarakat direspon sendiri oleh masyarakat bersangkutan dalam bentuk program pembangunan yang direncanakan dan sekaligus dilaksanakan oleh masyarakat. *Kedua*, identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat diakomodir oleh pemerintah untuk dimasukkan kedalam program pembangunan pemerintah.

3. *Uniformity* menjadi variasi lokal. Pendekatan pemberdayaan sangat memberikan toleransi kepada variasi lokal/kearifan lokal, dengan demikian program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan sangat berorientasi pada permasalahan dan kondisi serta potensi setempat.
4. Sistem komando menjadi proses belajar. Pendekatan pemberdayaan memosisikan masyarakat lebih berkedudukan sebagai subyek atau aktor, dalam hal ini, proses belajar yang dilakukan untuk meningkatkan inisiatif merupakan rangkaian pemantapan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini bermakna pengakuan akan kemampuan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah menuju kemajuan.
5. Ketergantungan menjadi keberlanjutan. Pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan akan lebih mendorong tumbuh kembangnya inisiatif dan kreatifitas yang memacu keberlanjutan.
6. *Social exclusion* menjadi *social inclusion*. Seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan bawah, mendapatkan peluang yang sama dalam berpartisipasi pada semua proses kehidupan, dalam mengakses semua pelayanan, serta dalam mengakses sumber daya dan informasi.
7. *Improvement* menjadi *transformation*. *Improvement* berarti memfokuskan perbaikan hanya dalam cara kerja dan proses produksi tanpa melakukan

perubahan pada tataran struktur, sedangkan pendekatan pemberdayaan lebih menekankan pada *transformation*, dimana fokus perubahan adalah pada level sistem dan struktur sosialnya.

C. Pendekatan Pemberdayaan dengan CD

CD atau pengembangan komunitas merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk terus dikaji dan direalisasikan. Berkembangnya konsep *CD* yang berbasis nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian (*self reliance*) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan komunitas bukan hanya merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang berjalan satu arah melainkan memungkinkan pemberi dan penerima terlibat dalam prosesnya yang mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *CD* merupakan salah satu metode yang tepat untuk menjawab isu-isu dan masalah-masalah sosial di Indonesia. Terlebih lagi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem komunal merupakan modal penting bagi pelaksanaan *CD*. Definisi *CD* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong optimalisasi kontribusi komunitas (Soetomo, dalam Alfitri, 2011:32). Pendapat lain disampaikan oleh Christenson dan Robinson (dalam Alfitri, 2011:32), mereka menyatakan bahwa *CD* adalah suatu proses pengembangan prakarsa masyarakat tertentu dalam rangka melakukan tindakan sosial (dengan

atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan. Penekanan konsepsi Christenson dan Robinson tersebut yakni pada prakarsa dan partisipasi masyarakat agar pemberdayaan dapat menolong diri masyarakat sendiri untuk keluar dari masalah.

Terdapat tiga pendekatan untuk perencanaan *CD*, yaitu, **pertama**, *development for community*. Pencetus pemberdayaan adalah perusahaan berstatus pendonor, sedangkan komunitas adalah sebagai obyek. **Kedua**, *development with community*. Pemberdayaan dalam hal ini dirumuskan bersama-sama oleh perusahaan pendonor dan masyarakat. **Ketiga**, *development of community*. Pemberdayaan dengan pendekatan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas.

CD sebagai konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat, dapat secara tegas diterangkan merupakan kontrol keputusan dan sumber daya oleh komunitas. Selain itu, kelompok dalam komunitas ini berpasangan dengan organisasi pendukung yang secara mendalam memperhatikan kebutuhan komunitas. (Wrihatnolo, dan Riant, 2007:136).

Tabel 1. Jenis *CD Approach*

	DEVELOPMENT FOR COMMUNITY	DEVELOPMENT WITH COMMUNITY	DEVELOPMENT OF COMMUNITY
<i>Inisiator</i>	Perusahaan	Perusahaan dan masyarakat	Masyarakat
<i>Status of corporate</i>	Pendonor	Agen pembangunan	Agen pembangunan
<i>Status of society</i>	Obyek	Obyek atau subyek	Sebagai subyek
<i>Goal</i>	Berorientasi hasil	Berorientasi pada	Pembangunan

		hasil pembangunan berproses	berproses
<i>Side effect/impact</i>	Tergantung	Tergantung dan swadaya	Swadaya
<i>Time frame</i>	Jangka pendek atau tujuan tertentu	Jangka menengah atau terus-menerus	Jangka menengah dan panjang/berkelanjutan

Sumber: Nindita dalam Alfritri (2011:36)

D. Kerangka Pikir

Development of Community yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan salah satu pendekatan *CD*, dimana *CD* muncul dalam diskursus keilmuan, menjadi respon terhadap banyaknya masalah yang dihadapi dunia menjelang format politik baru pada awal abad ke-20 (Zubaedi, 2013:1). *Development of Community* berorientasi pada pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan komunitas.

Perspektif *Development of Community* sebagai konsep ideal dalam riset ini, menempatkan masyarakat sebagai pemilik sumber daya mendasar yang mencakup tidak hanya pada potensi manusia dan alam, namun juga sumber daya sosial, budaya. Sehingga setiap pemberdayaan dengan pendekatan *Development of Community* menyediakan ruang pengembangan potensi menurut kapasitas tertentu demi menjangkau komunal masyarakat secara luas.

Peneliti menggunakan pendekatan *Development of Community* sebagai suatu proses pengembangan prakarsa masyarakat tertentu dalam rangka melakukan tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan. Penekanan konsepsi ini adalah pada prakarsa dan partisipasi masyarakat agar pemberdayaan dapat menolong diri masyarakat sendiri untuk keluar dari masalah. Pendekatan ini peneliti gunakan untuk melihat

bagaimana pemberdayaan yang dilakukan di Desa Pesawaran Indah melalui keberadaan program biogas.

Dengan pendekatan ini peneliti berusaha pula menemukan karakteristik kekuatan masyarakat Desa Pesawaran yang peneliti arahkan pula untuk mengidentifikasi karakteristik lokal setempat. Dengan pendekatan *Development of Community* ini peneliti hendak menganalisis bagaimana pelaksanaan dari program biogas ini. Apakah program biogas sebagai ranah pemberdayaan telah relevan dengan yang disyaratkan dalam *Development of Community*, yang secara konseptual menggariskan bahwa pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Dengan demikian, peneliti mengetengahkan alur kerangka pikir berupa, elaborasi atas pemberdayaan yang dilakukan di Desa Pesawaran Indah melalui program biogas. Program ini kemudian peneliti analisis menggunakan pendekatan *Development of Community*, guna menjelaskan secara deskriptif kualitatif perihal bagaimana pelaksanaan program biogas di Desa Pesawaran Indah, untuk menjelaskan apakah dalam pelaksanaannya telah relevan dengan *Development of Community* serta memberikan optimalisasi pemberdayaan *asset based* (potensi lokal) masyarakat.

Kerangka pikir ini diperlukan agar mampu menganalisis apakah unsur-unsur pemberdayaan berpendekatan *Development of Community* melalui biogas, telah berhasil diimplementasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Pesawaran Indah. Alur kerangka pikir yang demikian peneliti konseptualisasikan

agar dapat menganalisis secara obyektif tentang bagaimana program biogas dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan.

Bagan 1. Alur Kerangka Pikir

